

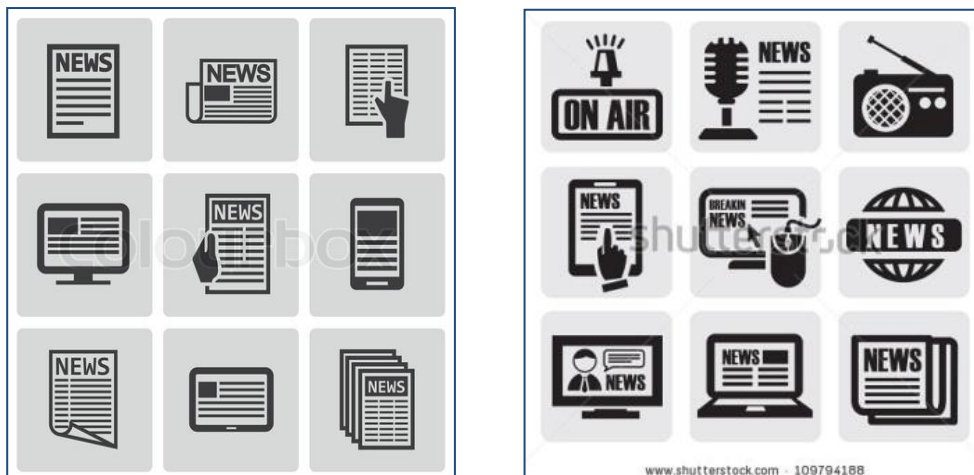


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Sarana & Prasarana

Senin, 9 Maret 2020



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2020**

Daftar Isi

1. PUBLIK BERHARAP BANYAK PADA AKSELERASI PERBAIKAN TOL LAUT (*Media Online Kompas*)

KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

Senin

9 Maret 2020

Publik Berharap Banyak pada Akselerasi Perbaikan Tol Laut

JAKARTA, KOMPAS — Program tol laut yang digulirkan Presiden Joko Widodo sejak akhir 2014 hingga kini belum efektif mengurangi disparitas harga di sejumlah daerah. Realisasi komitmen pemerintah untuk mengevaluasi dan membenahi program dinantikan publik.

Dari survei Litbang Kompas pada 29 Februari-1 Maret 2020 terhadap 544 responden di 30 kabupaten/kota, diketahui bahwa program tol laut masih membutuhkan sosialisasi meski sudah banyak dikenal. Sejumlah 51,84 persen responden mengetahui tol laut dan 47,98 persen tidak tahu.

Meski tol laut belum optimal, mayoritas responden meyakini program ini bisa mendukung kegiatan perekonomian di daerah perbatasan, terpencil, terisolasi, dan terluar di wilayah Indonesia. Sejumlah 79,41 persen responden menilai program tol laut bisa mendukung perekonomian. Hanya 8,46 persen yang menilai tidak bisa serta 11,58 persen menjawab tidak tahu.

Realitas di sejumlah daerah yang dilalui trayek tol laut menunjukkan, program belum signifikan memangkas biaya logistik yang tinggi. Bahkan, seperti yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor, Papua, program tol laut justru terhenti sejak November 2018.

Hendra Loa (40), salah satu pedagang di Biak Numfor yang pernah menggunakan jasa tol laut, mengungkapkan, program ini hanya menurunkan harga barang kebutuhan pokok seperti beras dan gula sebesar Rp 1.000 dan Rp 3.000. Tol laut

tidak berdampak signifikan karena biayanya yang tidak jauh berbeda ketimbang menggunakan angkutan non-tol laut. Faktor ketidakjelasan jadwal serta keterbatasan daya angkut turut memengaruhi keinginan Hendra menggunakan jasa tol laut.

"Bagi pedagang, faktor waktu berlayar dan jumlah muatan sangat menentukan. Saya lebih memilih angkutan non-tol laut karena lebih cepat dan mutunya hingga 25 ton," kata Hendra, pekan lalu.

Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Biak Numfor Pieter Rumbino mengatakan, selama setahun terakhir program tol laut tidak terlaksana di wilayah Biak.

"Pemerintah menghentikan program tol laut di Biak untuk mengevaluasinya kembali. Sebab, warga tidak terlalu merasakan dampak dari program ini," kata Pieter.

Di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, kapal pengangkut peti kemas tidak singgah ke Miangas karena tak satu pun pedagang yang mampu memanfaatkan fasilitas itu. Harga barang pokok dan penting pun tetap mahal. Miangas, pulau paling utara Indonesia, masuk dalam jaringan trayek T-5 yang terhubung dengan Bitung sejak 2019.

Kepala Biro Perekonomian

(Berlanjut ke hlm 11 dan 3-5)

klik.kompas.id/evaluasi

Tol Laut

- Konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia.
- Mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia 2045.

Trayek Tol Laut 2019

▶ Pelayaran 1 ▶ Target frekuensi round voyage 1 Jan-Des 2019

- 1 Tanjung Perak-Makassar-Bitung-Tidore-Tanjung Perak (H-1) ▶ 16 hari ▶ 23
- 2 Tanjung Perak-Manci-Namlea-Namole-Tanjung Perak (H-2) ▶ 15 hari ▶ 27
- 3 Tanjung Perak-Tenau-Saumiki-Dobo-Tanjung Perak (H-3) ▶ 19 hari ▶ 19
- 4 Tanjung Perak-Makassar-Kendari-Tanjung Perak (H-4) ▶ 11 hari ▶ 33
- 5 Belawan-Malahayati-Sabang-Kapal Tuan-Belawan PP (T-1) ▶ 8 hari ▶ 39
- 6 Teluk Bayur-Sinabang-Gn Sitoli-Mentawai (Sikakapi)-Teluk Bayur (T-2) ▶ 8 hari ▶ 47
- 7 Tanjung Priok-Tarempa-Seleat-Lampa-Penaji-Serasan-Hida-Tanjung Priok (T-3) ▶ 13 hari ▶ 23
- 8 Makassar-Polewali-Balangbelang-Sangatta-Nunukan/Sebatik-Makassar (T-4) ▶ 11 hari ▶ 31
- 9 Bitung-Tagulandang-Tahuna-Melanoane-Miangas-Marore-Bitung (T-5) ▶ 9 hari ▶ 39
- 10 Bitung-Pagimane-Bunta-Mantangisi-Perigi/Timombo-Tilamuta-Bitung (T-6) ▶ 10 hari ▶ 36
- 11 Makassar-Selayar-Jampea-Ps Wajo-Raha-Makassar (T-7) ▶ 9 hari ▶ 39
- 12 Kendari-Lameruru-Bungku-Kolonodale-Luwuk-Kendari (T-8) ▶ 8 hari ▶ 44
- 13 Tanjung Perak-Oransbari-Waren-Teba-Ambon-Tanjung Perak (T-9) ▶ 22 hari ▶ 16



KOMPAS/LASTI KURNIA

Kapal tol laut Kendhaga Nusantara 12 bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (8/3/2020). Pada rapat terbatas, Kamis (5/3), Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekecewaan atas program tol laut karena belum bisa memangkas biaya logistik antardaerah.

Publik Berharap Banyak pada Akselerasi

(Sambungan dari halaman 1)

Kepulauan Talaud Nus Easing menyatakan, trayek T-5 tol laut belum menyentuh Miangas. Selama 2019, jadwal kapal tidak jelas sehingga pelayanan bagi Miangas tidak maksimal. Hal itu turut menghambat pengiriman beras bantuan pangan nontani dari Bulog.

Nus Easing juga menyebut ketidakjelasan jadwal kapal sebagai alasan komunitas pedagang tol laut, yaitu Gerai Maritim seperti di Tahuna, belum terbentuk. "Lagi pula, harga sewa kontainer sangat mahal. Karena itu, hasil bumi dari Miangas tidak bisa dibawa dengan tol laut juga," katanya.

Disayangkan

Penelusuran di sebagian Nusa Tenggara Timur dan Maluku dalam sepekan terakhir, harga kebutuhan pokok juga masih tinggi. "Harga tidak pernah turun," ujar Hasna (55), pedagang yang puluhan tahun berjualan di Pasar Laramutka, Kabupaten Flores Timur, NTT.

Wakil Bupati Flores Timur

Agustinus Payong Boli menyayangkan program tol laut yang begitu ideal tetapi tidak dirasa manfaatnya oleh warga.

la menilai, tol laut justru menguntungkan pengguna yang kebanyakan pengusaha. Pengguna mendapatkan subsidi angkutan tol laut agar mereka menurunkan harga jual barang. Kenyataannya, harga barang tetap tinggi dan cenderung mahal.

Kepala Subdirektorat Angkutan Dalam Negeri Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Budi Mantoro mengatakan, turunnya harga barang di daerah yang dilayani tol laut masih menjadi tantangan. "Saya sepakat tantangan tol laut belum optimal menurunkan harga," ujarnya.

Menurut dia, di daerah dengan jumlah pengusaha yang minim, terbuka ruang terjadinya monopoli angkutan barang. Selain mewanti-wanti operator kapal untuk menunjuk orang yang berintegritas dalam proses validasi dan persetujuan kuota muatan, Kemenhub juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk mengawasi pe-

laksanaan tol laut, mulai dari penentuan kuota hingga harga jual di pasar.

Pada 2020, Kemenhub menetapkan 26 trayek tol laut dengan subsidi hingga Rp 439,83 miliar. Tahun lalu ada 18 trayek tol laut dengan subsidi Rp 264,28 miliar.

Kamis (5/3), Presiden memimpin rapat kabinet terbatas tentang evaluasi penerapan tol laut dan akselerasi program itu. Presiden menginstruksikan agar persoalan terkait tol laut dilihat secara detail dan komprehensif. Presiden berharap tol laut bisa ditingkatkan nilai tambahya serta bisa terhubung dengan kawasan industri dan sentra ekonomi lokal.

Sebelumnya, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan 28 rute "jembatan udara" untuk memopong kesinambungan program Gerai Maritim ke wilayah pedalaman. Rute-rute yang akan beroperasi tahun ini menjangkau Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua.

(FLO/OKAJAL/FRN/INA/HEO)

- 14 Saumlaki-Larat-Teba-Ma-Kisar-Kalabahi-Saumiki (T-12) ▶ 11 hari ▶ 32
- 15 Tenau-Rote-Subu-Lamakera-Tenau (T-13) ▶ 6 hari ▶ 55
- 16 Tenau-Lewoleba-Tablota-Larantuka-Marapokot-Tenau (T-14) ▶ 8 hari ▶ 45



Sumber: Pengembangan Tol Laut Dalam RPJPD 2015-2019. Diperinci, dalam Litbang Kompas/NTT

INFORMATIC ENERGY

Program tol laut yang digulirkan Presiden Joko Widodo belum efektif mengurangi disparitas harga di sejumlah daerah. Realisasi komitmen pemerintah untuk mengevaluasi dan membenahi program dinantikan publik dan Pengguna mendapatkan subsidi angkutan tol laut agar mereka menurunkan harga jual barang.

Hashtag Berita :

#Infrastruktur #RPJMN #FLPP #MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia #TolLaut #Kepulauan #OtoritasPelabuhan #PelaksanaanProyekNasional #BUMN